

## KIPRAH AMIR SYARIFFUDIN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN SAMPAI TAHUN 1948

Dr Aman, M.Pd, Zulkarnain, M.Pd, dan Wahyu Ragil

Email: [aman@uny.ac.id](mailto:aman@uny.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada pemerintahan dan setelah berakhirnya pemerintahanya 1945-1948. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amir Syariffudin memiliki peran yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Ia memiliki andil yang besar dalam dinamika pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai seorang nasionalis, ia pernah menduduki berbagai jabatan penting. Adapun jabatan penting tersebut antara lain: sebagai menteri penerangan, menteri keamanan, perdana menteri, dan wakil Indonesia dalam Perjanjian Renville.

**Kata Kunci: Amir Syariffudin, peran, politik, dan pemerintahan.**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the political contribution of Amir Syariffudin in government and after the end of his government at 1945-1948 . The method that the researcher used in the writing of this history is a research method according to Kuntowijoyo . The stages of historical research according to Kuntowijoyo has five stages, there are selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and writing. The results showed that Amir Syariffudin have a very big contribution in the dynamics government of the Republic of Indonesia. As a nationalist , he has held various important positions. His important positions are the minister of information, the security minister, prime minister, and the representative of Indonesia in Renville Agreement.*

**Keywords : Amir Syariffudin, roles, politics, and government.**

## Pendahuluan

Amir Syariffudin adalah seorang tokoh kharismatik. Dia adalah salah satu tokoh yang keras dalam sejarah nasional Indonesia (Gerry Van Klinken, 2009: 158). Amir Syariffudin pernah menjabat menteri keamanan rakyat pada kabinet Syahrir I dan menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet Sjahrir 2. Dalam era awal pemerintahan, Amir Syariffudin juga termasuk dalam kuartet pemimpin revolusi Indonesia yang saling berpasangan yang terus bergerak dinamis antara Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir Syariffudin, Hatta-Sjahrir, Soekarno-Amir Syariffudin. Menurut Jacques Leclerc salah satu sejarawan Perancis, mengatakan bahwa:

“Empat tokoh yang memimpin Indonesia selama bulan-bulan pertama, menurut urutan kehormatan institusional, naik turun kursi perdana menteri beriring-iringan seperti angka-angka sebuah arloji otomatis. Satu demi satu mereka turun, angka mereka masing-masing pun berkurang” (Jaques Leclerc, 2011: 47).

Masa awal pemerintahannya peran dan jasanya dalam kementerian penerangan sangat besar yakni meletakkan dasar-dasar organisasi dalam kementerian ini. Amir Syariffudin berhasil menjadikan kementerian penerangan sebagai kementerian yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia terhadap nafsu Belanda untuk berkuasa kembali.

Peran Amir Syariffudin sebagai menteri keamanan rakyat yaitu meletakkan dasar, hakikat, dan sifat daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentara yang diinginkan adalah suatu tentara yang militan, disiplin, dan memiliki semangat berkorban bagi kepentingan

bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Amir Syariffudin menginginkan agar di Indonesia hanya terdapat satu kesatuan tentara yakni TKR (Tentara Keamanan Rakyat) (Frederick D. Wellem, 2009: 219). Akan tetapi untuk pembentukan TKR, Amir Syariffudin harus bertindak hati-hati karena situasi Republik Indonesia telah melahirkan banyak kesatuan perjuangan (Frederick D. Wellem, 2009: 150).

Amir Syariffudin menjadi perdana menteri, ia gigih mempertahankan hidup Republik Indonesia, dua perkara yang dipertahankannya adalah Belanda harus mengakui Indonesia secara *de facto* dan masalah keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab negara Indonesia sendiri. Kabinet Amir Syariffudin adalah kabinet politis. Beliau lebih mementingkan aspek politis daripada aspek pembangunan sosial ekonomi. Kabinetnya merupakan kabinet raksasa karena semua golongan dan partai politik duduk di dalamnya.

Bulan Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer I terhadap Indonesia, tujuan Belanda adalah penghancuran Indonesia. Peristiwa ini memaksa Amir Syariffudin mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dengan keyakinan bahwa persetujuan Renville dapat menyelamatkan keadaan bangsa Indonesia dari Agresi Militer I Belanda. Tetapi hasil dari perundingan Renville dianggap merugikan bangsa Indonesia. Munculah berbagai reaksi publik. Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap kabinet Amir Syariffudin, begitu juga grub Syahrir dari PSI. Krisis kabinet tidak dapat dihindarkan, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syariffudin beserta kabinetnya mengembalikan mandat (G. Moedjanto, 1988: 23).

Setelah tidak lagi menjabat dikursi pemerintahan, Amir Syariffudin bergabung dengan golongan-golongan oposisi kiri dan tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Bersama FDR inilah Amir Syariffudin bergabung dengan Muso untuk menggulingkan Pemerintah Indonesia serta menggantikan dasar negara Indonesia dengan ideologi komunis. Fakta lainnya adalah seorang pejuang nasional yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan mati sebagai pemberontak. Revolusi memakan anak kandungnya sendiri (Taufik Abdulah dkk, 1979: 50).

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui kiprah politik Amir Syariffudin pada pemerintahan dan setelah berakhirnya pemerintahannya 1945-1948.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 91).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Amir Syariffudin sebagai Menteri Penerangan**

Amir Syariffudin tidak lama menjabat sebagai menteri penerangan hanya selama dua bulan karena jabatannya digantikan oleh M. Natsir. Kementerian Penerangan dilepaskannya pada tanggal 3 Januari 1946 (Wellem, 2009:142). Amir Syariffudin mulai mengatur kementerian yaitu sebagai pusat penerangan Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Amir Syariffudin berusaha menjalankan kementeriannya agar dapat menjadi suatu kementerian yang efektif

bagi penerangan tentang arti dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tugas pokok yang dikerjakan Amir Syariffudin dalam kementerian ini adalah (1) Memberi penerangan ke luar negeri tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan cita-cita revolusi serta ideologi negara Pancasila melalui radio *Voice of Free Indonesia* dan penerbitan-penerbitan, (2) Memberi penerangan di dalam negeri dengan berbagai cara lain dengan mengirimkan petugas ke daerah untuk menanamkan pengertian, menyebarkan arti proklamasi dan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia (Kementerian Penerangan, 1993:10).

Awal dibentuknya republik, kementerian penerangan merupakan kementerian yang terpenting dan memiliki pekerjaan sangat luas. Karena kementerian belum terorganisasi dengan baik maka pekerjaan yang tidak dapat ditampung dalam kementerian yang lainnya akan diserahkan kepada kementerian penerangan. Dengan melihat banyaknya bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian ini nampaknya kepercayaan pemerintah kepada Amir Syariffudin sangatlah besar. Memang beliau merupakan pejuang yang militan dan tokoh yang sangat terkemuka.

#### **Amir Syariffudin sebagai Menteri Keamanan**

Dalam Kabinet Syahrir, Amir Syariffudin juga diangkat menjadi menteri keamanan rakyat. Kementerian keamanan dipegangnya sampai dengan pembubaran kabinetnya sendiri yakni mulai pada tanggal 14 November 1947 hingga tanggal 23 Januari 1948 (Wellem, 2009:150). Pengangkatan Amir Syariffudin sebagai Menteri Keamanan Rakyat pada awalnya diwarnai dengan pro dan kontra dalam masyarakat (Leclerc, 2011:69). Kalangan tentara menolak pengangkatan tersebut karena kalangan tentara menginginkan

pengangkatan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat. Keinginan tentara tersebut berdasarkan hasil musyawarah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen dari seluruh Jawa dan Sumatera pada tanggal 12 November 1945. Isi musyawarah tersebut adalah mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat dan Kolonel Sudirman diangkat sebagai panglima besar serta Urip Soemohardjo diangkat sebagai kepala umum staf TKR.

Selain itu TKR juga keberatan apabila menteri keamanan rakyat diduduki oleh Amir Syariffudin dengan alasan sebagai berikut: (1) Mereka telah bermusyawarah dan sepakat mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat, (2) Amir Syariffudin tidak mempunyai pengalaman militer baik pada waktu penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang, dan (3) Amir Syariffudin adalah seorang yang beragama Kristen sedangkan sebagian besar anggota tentara beragama Islam (A.H. Nasution, 1968:241).

Akhirnya Syahrir tetap pada pendiriannya untuk menunjuk Amir Syariffudin sebagai menteri keamanan rakyat. Setelah Amir Syariffudin menduduki jabatannya maka ia menyatakan konsepnya tentang tentara. Tentang dasar TKR, Amir Syariffudin mengemukakan bahwa harus ada perbedaan antara TKR dengan kesatuan tentara yang ada sebelumnya, yaitu KNIL dan PETA. Bagi Amir Syariffudin KNIL telah dipergunakan oleh Belanda untuk memecah persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dasar bagi orang Indonesia yang masuk KNIL hanyalah mencari uang makan, keyakinan politik tidak mereka kuasai (Wellem, 2009:151).

Amir Syariffudin juga menginginkan adanya jurang pemisah antara tentara dan rakyat. Tentara tidak boleh merasa bahwa mereka mempunyai kuasa atas lembaga pemerintahan sipil. Tentara tugasnya bukanlah untuk menindas rakyat ataupun menakut-nakuti rakyat. TKR harus menjamin akan adanya keamanan dan ketentraman di antara rakyat serta menjadi pelindung rakyat. Berdasarkan konsep tersebut maka Amir Syariffudin mulai mengatur TKR. Pada tanggal 1 Januari 1946 TKR diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) melalui Penetapan Pemerintah No.2/SD.1946, atas usul Menteri Pertahanan Amir Syariffudin. Sejak saat itu Kementerian Keamanan disebut Kementerian Pertahanan. Kedudukan TKR ditegaskan sebagai alat negara, alat Republik Indonesia, yang harus patuh kepada pimpinan negara yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Amir Syariffudin Syariffudi sebagai Perdana Menteri

Masa akhir kabinet Sjahrir ditandai dengan penyerbuan Belanda. Akibatnya, pertahanan RI yang terdiri dari beberapa divisi harus mundur. Dalam waktu singkat, kota-kota besar di daerah-daerah strategis Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur jatuh. Sisa wilayah RI adalah daerah Banten, Jawa Tengah bagian tengah dan timur, serta Jawa Timur bagian barat. Umumnya, daerah-daerah ini padat dan miskin. Sasaran strategi Belanda adalah untuk membuka daerah-daerah ekonomis sebagai pangkalan dongkrak (.Soe Hok Gie, 2006:124). Setelah Kabinet Sjahrir jatuh maka presiden Soekarno mengundang para pemimpin partai politik untuk membicarakan pembentukan kabinet yang baru. Presiden memerintahkan kepada Amir Syariffudin (Partai Sosialis), Sukiman (Masyumi), A.K. Gani (PNI) dan Setiajit (PBI) untuk membentuk kabinet

yang baru tersebut. Perintah Presiden meminta agar pada tanggal 1 Juli 1947 sebelum jam 18.00 para pemimpin partai politik tersebut sudah mengajukan susunan kabinet yang baru (A.H. Nasution, 1978:48).

Selanjutnya para pemimpin partai politik tersebut mengadakan perundingan dalam hal pengajuan susunan kabinet yang baru. Masyumi menuntut agar kursi perdana menteri, kementerian dalam negeri serta dua kursi lainnya diberikan kepada Masyumi. Tentunya tuntutan dari partai Masyumi tersebut tidak disetujui oleh para pemimpin partai politik yang lainnya. Dan pada akhirnya mandat untuk membentuk kabinet tersebut kembali diserahkan kepada presiden Soekarno. Kemudian presiden Soekarno menunjuk ketiga pimpinan partai yaitu Amir Syariffudin, Gani, dan Setiajait untuk membentuk susunan kabinet baru tanpa mengikut sertakan Masyumi. Pada tanggal 3 Juli 1947 dilantiklah kabinet yang baru dan Amir Syariffudin ditunjuk sebagai perdana menteri sekaligus merangkap sebagai menteri pertahanan (Leclerc, 2011:88).

Kabinet Amir Syariffudin yang pertama ini merupakan kabinet koalisi nasional yang kuat karena semua partai dan golongan mendapat pembagian kursi. Karena Masyumi menolak untuk turut serta dalam kabinet Amir Syariffudin, maka jatah kursi Masyumi diberikan kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pembagian kursi-kursi dalam kabinet Amir Syariffudin antara lain Partai Sosialis mendapatkan 6 kursi, PNI mendapatkan 7 kursi, Non-partai mendapatkan 5 kursi, PBI mendapatkan 4 kursi, sedangkan partai Parkindo, PKRI, PKI, SOBSI, golongan pemuda dan Cina masing-masing mendapatkan 1 kursi dan jumlah menteri 34 orang (Kementerian Penerangan, 1970:6).

Susunan kabinet Amir Syariffudin adalah terdiri dari Setiadjud (PBI) menjadi wakil PK, Mr.Abdulmadjid sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Mr.Tamzil (Partai Sosialis) sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Dr.A. Tjokronegoro (Partai Sosialis) sebagai Menteri Muda Urusan Ekonomi, Dr. Ong Eng Djie sebagai Menteri Muda Keuangan, Dr. Satrio (PBI) sebagai Menteri Muda Kesehatan, Suprodjo (PBI) sebagai Menteri Sosial, S.K. Trimurti (YPSI) sebagai Menteri Perburuhan, Wikana (Komunis) sebagai Menteri Pemuda, Sojas (BTI) sebagai Menteri Negara bersama dengan Siauw Giek Tjhan (eks.BTI) dan Maruto Darusman (PKI). Penempatan pejabat-pejabat tinggi dan penting tetap dimonopoli pihak komunis. Sementara itu, Soeripno dijadikan duta keliling Indonesia di luar negeri.

Kabinet Amir Syariffudin mengumumkan program politik luar negeri adalah sebagai berikut: (1) Mempertahankan pengakuan *de facto* Negara Republik Indonesia, (2) Berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan secara damai Persetujuan Linggarjati, dan (3) Berusaha agar Indonesia secepat mungkin harus ikut serta dalam persoalan hidup internasional sesuai dengan kepentingan kedudukannya dalam dunia.

Sedangkan program politik dalam negeri dari kabinet Amir Syariffudin adalah sebagai berikut: (1) Menyempurnakan pemusatan tenaga rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan tanah air, (2) Memperbaiki susunan perwakilan rakyat di pusat dan di daerah secara demokratis dengan pemilihan demokratis yang dijalankan segera apabila keadaan masyarakat telah mengijinkan dengan nyata, (3) Meneruskan usaha menyempurnakan susunan pemerintah *collegial* dan seterusnya menjalankan politik menempatkan pegawai

yang sesuai dengan pertahanan dan pembangunan Negara, dan (4) Menyempurnakan dan memperkuat polisi negara sehingga menjadi satu alat negara yang melindungi hak-hak demokratis dan menjamin keamanannya. Selanjutnya pemerintahan Amir Syariffudin segera mengadakan kontak diplomatik dengan Belanda. Dengan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda ini, Amir Syariffudin sangat percaya pada bantuan dari Pemerintah Amerika. Kabinet Amir Syariffudin percaya bahwa Amerika sendiri mempunyai kepentingan di Indonesia yaitu Amerika menganggap keamanan di Indonesia sebagai faktor penting untuk stabilitas politik dan ekonomi dunia. Amerika takut kalau pengaruh komunis makin meluas di Asia Tenggara.

Tuntutan Belanda dijawab RI bahwa pemerintah menyetujui pembentukan direktorat bersama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Selain itu Belanda menyadari bahwa mereka berada dalam kedudukan kuat sehingga terus mendesak. Belanda menghendaki agar RI hanya merupakan negara bagian dari sebuah negara federal dan dalam masa peralihan agar Belanda mempunyai kedaulatan atas seluruh wilayah Hindia Belanda. Hal ini berarti RI akan kehilangan kekuasaan *de facto* dan *de jure* sekaligus. Namun Amir Syariffudin tetap pada pendiriannya bahwa republik harus diakui secara *de facto* dan penjagaan keamanan dalam negeri adalah urusan Republik sendiri, sehingga Belanda mulai menekan republik dengan kekuatan militernya. Belanda menuntut agar RI harus menghentikan blokade pemasukan bahan makanan dan perbaikan lalu lintas sepanjang garis demarkasi dan hubungan dengan luar negeri harus dibatalkan. Tuntutan Belanda semakin banyak karena

mengetahui republik dalam keadaan yang lemah.

Tuntutan tersebut dibarengi dengan tekanan militer sehingga keadaan semakin genting. Amir Syariffudin sadar bahwa kekuatan dan pertahanan TNI tidak cukup untuk menghadapi agresi militer Belanda yang diperlengkapi dengan persenjataan modern. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Amir Syariffudin agar sedapat mungkin penyelesaian pertikaian ini dapat dilakukan agar sedapat mungkin penyelesaian pertikaian ini dapat dilakukan dengan jalan damai, tanpa memakan banyak korban yang berjatuh antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 14-17 Juli, Amir Syariffudin, A.K. Gani, Setiadjit, dan Leimena berada di Jakarta untuk berunding dengan Belanda yang diwakili oleh H.J. van Mook, Schermerhorn, van Poll, Idenburg, dan Koets. Pokok perundingan adalah mengenai penyelesaian keadaan sekitar garis demarkasi, Belanda memberikan usul baru sebagai berikut: (1) Dibentuk suatu direktorat bersama di dalam pemerintahan peralihan, (2) Kesatuan polisi Belanda ditempatkan dalam negeri untuk membantu keamanan di dalam negara bagian, (3) Menempatkan orang Belanda dalam pimpinan dan pendidikan korps polisi, (4) Menghentikan semua permusuhan di semua front, dan (5) Tentara kedua belah pihak diundurkan 10 kilometer dari garis demarkasi yang harus dilakukan lebih dahulu oleh tentara Republik dan kemudian oleh tentara Belanda dan selanjutnya tentara masing-masing dimasukkan ke dalam garnizon, sedang daerah demarkasi dijaga oleh polisi bersama.

Amir Syariffudin segera kembali ke Yogyakarta untuk membahas usul baru dari Belanda tersebut dan republik memberikan jawaban sebagai berikut. 1) Pembentukan badan bersama untuk

membuat peraturan-peraturan keamanan yang terdiri dari wakil-wakil Negara-negara bagian dan Belanda, ditempatkan pada pusat pemerintahan peralihan. 2) Keamanan dalam Negara-negara bagian tetap menjadi tanggung jawab Negara-negara sendiri. 3) Bantuan dari tenaga-tenaga ahli Belanda dapat diterima atas permintaan Negara-negara bagian itu sendiri.

Keinginan RI untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dengan jalan damai mengalami kegagalan karena pada tanggal 20 Juli 1947 lewat tengah malam Perdana Menteri Beel menjelaskan bahwa pemerintah Belanda pada malam itu telah memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal H.J. van Mook untuk menggunakan tentara Belanda guna melaksanakan suatu aksi polisional. Pada malam itulah juga Belanda telah melakukan aksi militernya di Jakarta dengan menduduki kantor-kantor republik. Wakil Perdana Menteri A.K. Gani, Menteri Muda Luar Negeri Tamzil, Walikota Jakarta Suwirjo, Sekretaris Dewan Kabinet Ali Budiardjo ditangkap dan ditawan oleh Belanda.

Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI di mana-mana pertahanan TNI dipukul mundur sedangkan tentara Belanda berhasil menguasai daerah-daerah RI. Atas agresi militer Belanda tersebut Perdana Menteri Amir Syariffudin berpidato di radio, Amir Syariffudin menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam waktu yang singkat ini, Belanda mampu mencapai banyak tujuan akhir geografisnya, mereka tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu menghancurkan organisasi utama pasukan bersenjata Republik (Kahin, 1995:268).

Dalam pidato di radio tanggal 22 Juli 1947, Amir Syariffudin juga meminta perhatian dunia untuk memberikan bantuan

supaya pertikaian ini dapat segera di akhiri. Amir Syariffudin menyatakan bahwa perselisihan politik antara Indonesia-Belanda akan mengganggu perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Selain itu Amir Syariffudin juga meminta intervensi PBB terhadap serangan Belanda tersebut atas Republik Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 1947. Seruan Perdana Menteri Amir Syariffudin dan Presiden Soekarno mendapat tanggapan dari Negara-negara di Timur Tengah, Polandia, Amerika, Australia, India dan sebagainya. Amerika menawarkan jasanya untuk menjadi penengah dalam perselisihan ini dan Indonesia meminta Amerika untuk mendesak PBB untuk membentuk panitia perundingan. Pada tanggal 30 Juli 1947 India dan Australia mendesak Dewan Keamanan PBB agar masalah agresi militer Belanda atas Republik Indonesia dijadikan mata acara perdebatan dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut menghasilkan resolusi agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan dan konsul-konsul Negara asing yang berada di Jakarta akan mengadakan penyelidikan tentang keadaan yang sebenarnya. Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut tiba di Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 1947. Setelah datangnya Resolusi Dewan Keamanan PBB, Amir Syariffudin berpendapat bahwa beribu-ribu pemuda Indonesia yang ditahan Belanda dapat dibebaskan, tentara Belanda harus ditarik ke garis demarkasi yang ditetapkan, pegawai RI yang ditahan Belanda harus dikembalikan pada kedudukannya yang semula dan segala propaganda Belanda yang menjelekkkan Indonesia harus segera dihentikan.

Perdana Menteri Amir Syariffudin menyampaikan pengumuman resmi kepada

PBB yang intinya menyatakan bahwa Republik Indonesia telah memerintahkan penghentian permusuhan. Republik juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar segera mengirim suatu panitia untuk mengawasi pelaksanaan penghentian permusuhan supaya berjalan dengan baik. Gubernur H.J. van Mook dari Jakarta mengumumkan penghentian permusuhan kepada pasukan Belanda, namun usaha pembersihan dalam wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda sejak 21 Juli terus dilaksanakan, bahkan pasukan Belanda terus menyusup ke daerah republik. Karena banyaknya terjadi pertempuran-pertempuran, Pemerintah Republik pun mencatat pelanggaran-pelanggaran Belanda dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Akhirnya Dewan Keamanan PBB campur tangan lagi dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan tiga negara yakni Belgia yang merupakan pilihan dari Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai wakil dari PBB. Komisi ini terdiri dari Prof. Frank Graham (USA), Richard Kirby (Australia), dan Paul van Zeeland (Belgia) (Wellem, 2009:170). KTN kemudian mengadakan perundingan lanjutan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini berjalan lambat. Kedudukan delegasi Indonesia melemah, namun para pemimpin sayap kiri sesuai dengan hasil evaluasi tetap berpendapat bahwa perundingan tetap merupakan jalan yang paling baik (Soe Hok Gie, 2006:126). Komisi Tiga Negara mulai bekerja pada bulan September 1947, usaha KTN tersebut membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan di atas kapal "USS Renville".

Amir Syariffudin mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Di hadapan Badan Pekerja KNIP, Perdana Menteri Amir

Syariffudin menerangkan politik pemerintah dalam menghadapi perundingan dengan Belanda. Politik pemerintah adalah sebagai berikut: (1) Agar Belanda mengakui RI secara *de facto* dan secara *de jure*, (2) Pasukan Belanda harus ditarik kembali ke garis demarkasi pada tanggal 14 Oktober 1946 atau sekurang-kurangnya keadaan tanggal 20 Juli 1947, dan (3) Menuntut seterusnya agar pasukan Belanda diundurkan dari seluruh daerah republik dan di kemudian hari dari seluruh Indonesia (Wellem, 2009:171).

Untuk menghadapi perundingan dengan Belanda maka Amir Syariffudin meminta kepada Masyumi untuk turut serta dalam kabinet. Permintaan Amir Syariffudin tersebut dipenuhi oleh Masyumi tanpa menuntut suatu apapun juga karena mengingat keadaan republik yang sedang sangat genting. Oleh karena itu kabinet Amir Syariffudin diubah susunannya pada tanggal 11 November 1947. Komposisinya sebagai berikut: Partai Sosialis sebanyak tujuh orang, PNI sebanyak delapan orang, PSII sebanyak tiga orang, Masyumi sebanyak lima orang, PBI sebanyak empat orang, golongan Cina, pemuda, SOBSI, Parkindo, PKRI, PKI masing-masing satu orang dan non partai empat orang (Kementerian Penerangan, halaman 7).

#### Amir Syariffudin dalam Perundingan Renville

Seperti Sutan Sjahrir yang berhadapan dengan perundingan Linggarjati, Amir Syariffudin sendiri dihadapkan dengan perundingan Renville. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara dilangsungkan di atas kapal Amerika USS Renville yang di labuhkan di Tanjung Priok Jakarta. Dimana Amir Syariffudin meminta kepada dewan keamanan PBB agar tempat perundingan



harus diadakan di luar daerah pertikaian (Wellem, 2009:172). Perundingan dibuka pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syariffudin, Wakil Ketua Ali Sastromidjojo, anggotanya adalah Sutan Sjahrir, Tjoa Sek Ien, Mr. Narsoen, Ir.Djuanda. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wirjoatmodjo, Wakil ketua H.L.K.F van Vredenburg, tujuh orang anggota, dua orang sekretaris dan tiga orang pembantu (A.H. Nasution, 1968:51-51).

Dalam perundingan ini delegasi Belanda menuntut agar perundingan terlebih dahulu menyelesaikan masalah gencatan senjata dan sesudah itu barulah masalah politik. Sedangkan pihak RI menuntut sebaliknya karena beranggapan masalah permusuhan akan selesai dengan sendirinya kalau telah ada penyelesaian secara politik (Wellem, 2009:173). Pihak Belanda tidak mau mundur dengan tuntutan. Sehingga diadakanlah perundingan antara Komite Teknis pihak Indonesia yang diketuai oleh Dr. J. Leimena dengan komite teknis Belanda yang dipimpin oleh van Vredenburg. Perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu karena Belanda menolak tuntutan Komisi Teknis Indonesia agar tentara Belanda ditarik kembali hingga garis demarkasi yang telah disepakati bersama pada 14 Oktober 1946. Pihak Belanda menuntut garis demarkasi sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai oleh tentara Belanda pada tanggal 28 Agustus 1947. Garis ini disebut oleh Belanda sebagai garis Van Mook.

Perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu maka KTN pada tanggal 3 Desember mengajukan usul sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak akan memberikan sebuah peta kepada KTN dimana ditetapkan daerah-daerah yang

dikosongkan yang akan menjadi batas antara daerah-daerah yang dikuasai masing-masing pihak.

- Bahwa kedua belah pihak akan memajukan alasan-alasannya kepada KTN atas dasar apakah daerah-daerah yang dikosongkan itu dimajukan oleh masing-masing komisi.
- Bahwa kedua belah pihak dalam menyusun alasan-alasan dan usul-usul yang akan diajukan kepada wakil KTN harus mengingat berbagai faktor.

Sekali lagi republik menyatakan bersedia menerima usul-usul KTN yang baru ini. Pihak Belanda menolak usul-usul baru ini karena masih memegang garis demarkasi tertanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu pertempuran antara Indonesia dan Belanda terus saja berjalan. Mojokerto, Malang Selatan, Ambarawa dan daerah Siak di Sumatra diserang oleh Belanda.

Pada tanggal 25 Desember 1947 pihak KTN mengajukan usul baru berupa gencatan senjata baru, yang dikenal dengan Usul-usul Hari Natal. Usul-usul tersebut memuat hal-hal yang didalam bidang militer mendekati tuntutan Belanda, sedangkan dalam bidang politik membayangkan suatu cara yang demokratis yang bagi republik memberikan harapan bagi daerah yang sudah lepas dari kekuasaannya akan diperoleh kembali. Pokok-pokok usulannya sebagai berikut: (1) Pengunduran tentara Belanda ke tempatnya pada tanggal 21 Juli (kedudukan sebelum agresi militer) dalam tempo tiga bulan, (2) Pengakuan oleh pihak republik garis demarkasi yang ditetapkan sendiri oleh van Mook pada tanggal 29 Agustus, dan (3) Demiliterisasi di antara kedua garis demarkasi di atas serta menempatkan pegawai-pegawai sipil republik di situ.

Sementara itu Belanda giat mengadakan persiapan untuk membentuk

Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur, dan Sumatra Timur. Tindakan Belanda ini merupakan suatu pelanggaran di depan KTN karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah RI yang direbut Belanda. Tanggal 03-05 Januari 1948 kabinet RI bersidang terus menerus untuk mencari jalan pemecahan yang baik. Soetan Sjahrir, duta keliling RI dipanggil kembali untuk diminta pertimbangannya, selain itu para pemimpin partai diundang juga untuk menghadiri sidang. Hasil sidang adalah menolak hasil amandemen Belanda dan sikap penolakan tersebut dibawa sendiri oleh Amir Syariffudin pada tanggal 7 Januari 1948. Kini KTN giat mengadakan perundingan informal dengan masing-masing pihak KTN mendesak RI untuk mendekati tuntutan Belanda karena Belanda tidak mau mundur dari tuntutannya. Pada tanggal 9 Januari secara tiba-tiba Belanda mengultimatum RI agar menerima tuntutannya secara mutlak dalam tempo tiga hari dan apabila menolak tuntutan maka delegasi Belanda akan meminta intruksi baru dari Den Haag yang artinya akan terjadi peperangan lagi. Amir Syariffudin ketika berakhirnya pemerintahannya

Sesudah jatuhnya kabinet Amir Syariffudin dengan ditandainya diserahkannya mandat oleh Amir Syariffudin kepada presiden Soekarno, maka sebagai gantinya dibentuklah kabinet presidensial yang menunjuk Moh.Hatta sebagai perdana menteri. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) melakukan demonstrasi agar kabinet tetaplah presidensial dan Amir Syariffudin tidak lagi menjadi perdana menteri. Namun sebaliknya anggota sayap kiri melakukan demonstrasi tandingan dengan tujuan supaya Amir Syariffudin tetap menjadi perdana menteri sekaligus merangkap sebagai menteri pertahanan (Wellem, 2009:179). Mohammad Hatta berusaha

menarik semua wakil-wakil partai untuk duduk dalam kabinet sehingga kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang kuat dalam menghadapi perundingan dengan Belanda.

Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri menyatakan bersama-sama akan mendukung kabinet Hatta apabila mendapatkan sekurang-kurangnya empat kursi kepada pihak mereka. Namun hal ini ditentang oleh Masyumi dan PNI menyatakan bahwa apabila tuntutan partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri dipenuhi maka mereka tidak mau bergabung ke dalam kabinet Hatta. Pada akhirnya Hatta tidak dapat memenuhi tuntutan Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri sehingga terbentuklah kabinet Hatta tanpa menyertakan Partai Sosialis dan juga anggota sayap kiri.

Setelah kabinetnya jatuh Amir Syariffudin mulai dikelilingi oleh tokoh-tokoh komunis dari sayap kiri seperti Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Setiadjit, dan sebagainya. Dari sini mulailah tokoh-tokoh sayap kiri mulai berusaha menarik Amir Syariffudin ke dalam golongan komunis. Pada suatu rapat umum di Surakarta tanggal 26 Februari 1948, sayap kiri melakukan reorganisasi dan membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang beranggotakan Partai Sosialis dan golongan sayap kiri (PKI, PBI, PESINDO, SOBSI). FDR kemudian memilih Amir Syariffudin sebagai ketuanya dan memiliki program kerja sebagai berikut: (1) Menginginkan dibataalkannya Persetujuan Renville, (2) Tidak mengadakan perundingan dengan Belanda sebelum mereka mengundurkan diri dari Indonesia, dan (3) Menasionalisasikan semua harta kekayaan milik Belanda dan milik bangsa asing lainnya tanpa ganti rugi (Kahin, 1995:328).

Selanjutnya FDR menjadi pihak oposisi terhadap kabinet Hatta dan FDR berusaha untuk menjatuhkan kabinet Hatta.

FDR berharap dapat menggantikan kabinet presidensial dengan kabinet parlementer. Proses pendemokarsian dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi adalah penting sekali untuk dilaksanakan. FDR juga menyerukan agar mempertahankan tentara karena kekuatan tentara sangat diperlukan untuk menghadapi tekanan militer Belanda. Perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi supaya dijalankan dengan cara ekonomi desa harus didasarkan pada koperasi, mengurangi keuntungan dalam perdagangan, dan melipatgandakan produksi serta bertindak keras terhadap pasar gelap (Wellem, 2009:180).

Oposisi FDR makin hari makin meningkat dan keras. Walaupun demikian, Hatta masih mengikutsertakan FDR dalam penyusunan suatu program yang disebut "Program Nasional". Program Nasional ini dimaksudkan agar kelak menjadi dasar bagaimana membentuk kabinet. FDR melihat penyusunan Program Nasional ini merupakan kesempatan untuk dapat kembali menguasai kabinet. Program nasional ini diketuai oleh A.M. Tambunan dengan anggotanya antara lain Sujono Hadinoto, Amir Syariffudin, D.N. Aidit, Setiadjit, M.Saleh Suhaidi dan Maruto Nitimihardjo. Beberapa pokok Program Nasional diantaranya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dengan diterimanya Program Nasioal oleh pemerintah harapan FDR agar dapat berhasil menjatuhkan kabinet Hatta dan menguasai kabinet tidak terpenuhi Hal tersebut disebabkan Masyumi dan PNI menolak adanya perubahan sistem kabinet mengingat keadaan negara masih genting karena ancaman Belanda.

Pada petengahan Juli 1948 FDR merencanakan program untuk menjatuhkan pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen FDR yang berjudul Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru. Dalam dokumen ini strategi digariskan atas dua

fase yaitu dengan memakai cara parlementer dan kalau cara ini gagal maka ditempuh cara kedua yaitu dengan memakai cara non-parlementer. Seperti yang kita ketahui bahwa FDR sangat berambisi agar pemerintah dapat membubarkan kabinet presidensial Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer yang di dalamnya terdapat Amir Syariffudin sebagai perdana menteri. Dalam hal ini FDR memutuskan apabila pemerintah terus saja menolak membubarkan kabinet Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer maka FDR akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah. Dan kemudian melanjutkan perjuangan FDR di bawah kepemimpinannya sendiri baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintahan yang terpisah. Rencana FDR tersebut tidak diketahui oleh pemerintah hingga pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Barulah pada tanggal 19 September 1948 Kaptan Maulana dari Siliwangi menemukan dokumen tersebut dari lemari Amir Syariffudin di rumahnya (A.H. Nasution, 1978:249).

Rencana Amir Syariffudin dengan pemimpin FDR lainnya berjalan di luar apa yang diharapkan. Pada tanggal 3 Agustus 1948 di Bukit Tinggi tibalah Suripno perwakilan Indonesia di Praha bersama sekretarisnya yang bernama Muso. Setelah Muso diangkat menjadi sekretaris jenderal PKI, ia menganjurkan untuk mendirikan Front Nasional dan semua anggota partai harus bergabung di dalamnya. Kabinet yang sekarang harus dibubarkan dan diganti dengan kabinet nasional yang menteri-menterinya bukanlah wakil-wakil partai tetapi dicalonkan oleh front nasional (Wellem, 2009:185). Untuk memperoleh kabinet yang kuat adalah membentuk kabinet front nasional di mana wakil-wakilnya yang paling cakap akan duduk di

dalamnya. Muso telah datang membawa intruksi baru dari Moskow.

Muso mulai berusaha untuk meluruskan revolusi Indonesia yang menurutnya selama ini berjalan salah. Ia menyerukan agar semua partai politik mengadakan suatu front nasional bersama demi berhasilnya revolusi Indonesia. Golongan sayap kiri dan juga Partai Sosialis menyetujui seruan dari Muso dan kemudian bersama-sama meleburkan diri ke dalam PKI. Pada tanggal 29 Agustus 1948 Amir Syariffudin mengeluarkan pernyataan bahwa ia telah menjadi komunis sejak tahun 1935 ketika Muso mendirikan PKI ilegal di Surabaya. Pengakuan Amir Syariffudin sangat mengagetkan umum, namun para pemimpin Indonesia nonkomunis seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir berpendapat bahwa Amir Syariffudin sebelumnya bukanlah anggota PKI meskipun ia mempunyai hubungan dengan PKI ilegal. Amir Syariffudin bukanlah seorang komunis tetapi seorang nasionalis. Pengakuan Amir Syariffudin saat ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena kekecawaannya kepada Amerika Serikat dan oportuniste politik (Kahin, 1995: 273-274).

Amir Syariffudin dalam Peristiwa Madiun sampai Akhir Hayatnya

Sesudah peleburan Partai Sosialis ke dalam PKI maka Amir Syariffudin bersama-sama Muso dan pimpinan PKI lainnya menjalankan aksi propaganda didepan para pemuda, buruh dan petani. Muso menyatakan bahwa Rusia adalah pemimpin revolusi dunia dan Indonesia harus berada di bawah Soviet. Kalau di pihak Rusia kita adalah benar. PKI juga sangat bertentangan dengan Masyumi serta PNI. Di daerah Solo terdapat bermacam-macam pasukan, mulai dari lascar pro-sayap kiri (Pesindo) dan pasukan yang pro-Tan Malaka (Barisan Banteng), Pasukan

TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) di bawah Letkol Jandau, pasukan Divisi IV Panembahan Senopati, sampai pasukan Tentara Pelajar (TP) di bawah kepemimpinan Achmadi. Selain itu, sejak Februari 1948 datang pasukan-pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat (Soe Hok Gie, 2006:233).

Keadaan Kota Solo menjadi sangat kacau, terjadilah saling culik menculik dan tuduh menuduh antara PKI dengan Gerakan Rakyat Revolusi (GRR). Masing-masing pihak mengumumkan orang-orangnya hilang dan menuduh pihak yang lainnya yang menculik. Pertentangan itu menjaral menjadi pertentangan antara Divisi Senopati dengan Divisi Siliwangi. Peristiwa pertentangan antara Divisi Senopati dengan Divisi Siliwangi dimulai pada tanggal 11 September, Letkol Suadi menuduh batalyon Siliwanginya Sadikin telah menculik para perwira PKI yang hilang itu, dan menuntut agar mereka dikembalikan pada tanggal 13 September menjelang pukul 14.00 WIB. Pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan dan para korban penculikan tersebut belum dikembalikan, Suadi menyuruh orang-orangnya dari kesatuan TNI untuk menyerang barak-barak Siliwangi (Kahin, 2005:366).

Keadaan genting Solo menyebabkan Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi gubernur militer di Solo pada tanggal 16 September 1948. Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo pada tanggal 18 September dan ia segera mengeluarkan intruksi bahwa pada pukul 12.00 tanggal 21 September, semua komandan satuan-satuan yang sedang bermusuhan harus melaporkan diri. Komandan yang tidak melaporkan diri dianggap sebagai pemberontakan. Malamnya, Presiden Soekarno berpidato melalui radio Yogyakarta kepada seluruh rakyat, terutama rakyat Solo. Beliau mengatakan

bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan keras di Surakarta dan berharap bahwa segalanya diselesaikan dengan baik. Sementara ketegangan di Solo berlangsung, para pemimpin PKI seperti Muso, Amir Syarifudin, Wikana, Harjoono, Setiadjit mengadakan perjalanan keliling untuk propaganda partai di seluruh Jawa Tengah dan beberapa kota di Jawa Timur.

Namun selanjutnya terjadi sebuah peristiwa yang tidak diduga oleh para pemimpin PKI telah terjadi di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, pada pagi hari pemberontakan PKI di Madiun dicituskan oleh Sumarsono dan Djokosujono. PKI berhasil merebut Madiun dari tangan pemerintah dan mengajak agar PKI di daerah lain mengikuti jejak yang telah diambil oleh PKI di Madiun. Muso dan Amir Syarifudin yang mendengar berita pemberontakan tersebut segera berangkat dari Purwodadi menuju Madiun. Mereka kini tidak dapat berbuat lain kecuali mendukung dan meneruskan pemberontakan yang telah dimulai tersebut. Berita pemberontakan di Madiun baru diketahui oleh pemerintah di Yogyakarta pada tanggal 18 September 1948 sore harinya. Presiden Soekarno atas persetujuan kabinet memberikan kekuasaan kepada Panglima Besar Sudirman untuk menyelamatkan kehidupan negara. TNI segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PKI di Yogyakarta seperti Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Maruto Darusman, dan Ngadiman. Malam harinya Nyonya Amir Syarifudin juga ditangkap. Penangkapan tokoh PKI di kota lainnya segera dilaksanakan. Koran-koran pro-FDR ditutup, SOBSI yang sedang bersidang di Tugu dengan mudah disergap. Esok harinya Panglima Besar Sudirman melaporkan kepada pemerintah bahwa kota Yogyakarta telah diamankan.

Pada tanggal 19 September 1948 Presiden Soekarno mengucapkan pidato radionya. Soekarno menjelaskan kepada rakyat akan pentingnya persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman Belanda dan pengacau dalam negeri. Ia juga menguraikan tentang kerusuhan yang terjadi di Solo dan akhirnya tentang PKI Muso yang telah mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Pidato tersebut diikuti oleh pidato Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan menyerukan agar rakyat membantu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian kedudukan pemerintah amat kokoh dalam menghadapi pemberontakan karena TNI secara tegas kepada mereka.

Selanjutnya rencana-rencana operasi dipersiapkan oleh Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, dan pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI. Kekuatan PKI melarikan diri ke luar kota, dan TNI terus mengadakan pengejaran. Pada tanggal 30 Oktober 1948 Muso tertembak karena mengadakan perlawanan di Ponorogo. Pada tanggal 29 November 1948 Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo berhasil ditangkap di Priangan, Purwodadi. Djokosujono memberitahukan bahwa Amir Syarifudin dan Suripno juga berada di Purwodadi. Pada hari itu juga jam 20.00 WIB, Amir Syarifudin dan Suripno ditangkap di desa Klambu, 20 kilometer barat daya Purwodadi.

Dengan ditangkapnya Amir Syarifudin dan Suripno maka semua pemimpin pemberontakan telah tertangkap atau tertembak dalam pertempuran kecuali D.N. Aidit yang berhasil melarikan diri ke luar negeri. Dalam keterangannya Amir Syarifudin tidak bermaksud melarikan diri ke daerah yang diduduki oleh Belanda tetapi hendak kembali ke Solo dan terus ke Yogyakarta dengan menyamar sebagai pedagang.

Amir Syariffudin dan Suripno dibawa ke Kudus dan seterusnya diangkut menggunakan kereta api khusus ke Yogyakarta. Amir Syariffudin meminta kepada perwira yang mengurusnya, Kapten Soeharto, untuk memberikan buku. Kebetulan satu-satunya buku yang dimiliki Kapten Soeharto ialah novel *Romeo dan Juliet*. Selanjutnya Amir Syariffudin membaca buku tersebut sambil menantikan kedatangannya di Yogyakarta. Amir Syariffudin duduk sendiri di kereta api yang sengaja dikosongkan untuknya. Ketika sampai di stasiun Yogyakarta, rakyat tampak berjejal-jejal untuk dapat melihat wajah Amir Syariffudin yang merupakan mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Soe Hok Gie, 2006:269-270).

Di Yogyakarta mereka ditahan di Benteng, depan gedung Agung Yogyakarta. Namun jaksa agung berpendapat bahwa itu adalah kewajiban TNI untuk memeriksa mereka. Oleh karena itu mereka dikirim kembali kepada gubernur militer di Solo untuk diperiksa, sebelum diserahkan kepada jaksa agung. Ketika Amir Syariffudin ditahan di Yogyakarta, maka Ds. F.K.N Harahap berusaha untuk menyelamatkan Amir Syariffudin dengan mencoba menghubungi Soekarno dan Hatta. Namun usaha itu gagal karena Amir Syariffudin sendiri tidak menyetujui usaha tersebut. Pada tanggal 18 Desember 1948 diadakan rapat kabinet untuk membicarakan tindakan apa yang dapat ditempuh kepada para pemimpin-pemimpin PKI jikalau Belanda mengadakan agresi militernya lagi. Dari 12 orang menteri yang datang maka sebanyak empat orang menghendaki agar Amir Syariffudin dan kawan-kawan ditembak mati saja, empat orang lagi berpendapat supaya dipenjarakan namun tidak ditembak mati sedangkan empat orang sisanya tidak memberikan suara. Selanjutnya Presiden

Soekarno mengeluarkan vetonya bahwa Amir Syariffudin dan kawan-kawannya tidak boleh ditembak mati juga (Wellem, 2009:198).

Seorang letnan menjelaskan adanya surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto untuk menembak mati Amir Syariffudin beserta pimpinan-pimpinan PKI yang lainnya yang sedang ditahan di Solo. Keputusan ini diambil karena dikawatirkan Amir Syariffudin beserta pimpinan-pimpinan PKI lainnya akan ikut melakukan pemberontakan atau menyeberang membantu Belanda. Amir Syariffudin sebelum ditembak mati meminta agar semua tawanan diberi kesempatan untuk berjanji sebentar. Semua tawanan menulis surat satu per satu dan diserahkan kepada letnan tadi. Sebelum ditembak mati, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu internasional.

Jenazah Amir Syariffudin dan dikuburkan secara massal di daerah Ngalian, sebelah timur kota Solo pada hari Minggu pagi tanggal 19 Desember 1948. Pemerintah RI belum dapat menyerahkan jenazah-jenazah tersebut kepada keluarganya masing-masing karena Belanda telah menyerang Indonesia dan berhasil menawan para pemimpin Indonesia. Barulah pada tahun 1950 setelah situasi dirasa memungkinkan maka pemerintah menyetujui penggalian kembali jenazah para pemimpin pemberontakan itu dan menyerahkan kepada keluarga masing-masing.

### **Simpulan**

Amir Syariffudin dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1907 di Tapanuli Selatan dari pasangan Baginda Soripada Harahap dengan Basoenoe boru Siregar. Sesudah Amir Syariffudin berusia cukup untuk sekolah maka ia memasuki sekolah dasar ELS (*Europeesche Lagere School*) di Medan pada tahun 1915 dan pada tahun

1917 ia pindah ke ELS di Sibolga. Selanjutnya Amir Syariffudin memilih melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda yakni di sebuah *gymnasium* negeri di Harleem. Pada September 1927 Amir Syariffudin kembali ke Hindia Belanda, di Batavia Amir Syariffudin mendaftar di *Rechtshoogeschool* (RHS) dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Amir Syariffudin mulai aktif dalam organisasi kedaerahan dan organisasi pemuda yang bersifat nasional, kemudian Amir Syariffudin melanjutkan kiprah politiknya ke dalam partai politik. Pada organisasi kedaerahan kiprahnya adalah sebagai pemimpin Jong Sumatranen Bond dan Jong Batak Bond. Amir Syariffudin tergabung juga dalam organisasi pemuda yang bersifat nasional yaitu Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam partai politik Amir Syariffudin tergabung Partai Indonesia (Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Gabungan Politik Indonesia (Gapi), dan Partai Sosialis (PS). Amir Syariffudin juga pernah tergabung dalam Liga Anti Fasis.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Amir Syariffudin berhasil menduduki jabatan penting dalam kabinet republik Indonesia yaitu sebagai menteri penerangan, menteri keamanan rakyat atau pertahanan, serta sebagai perdana menteri. Sebagai menteri penerangan Amir Syariffudin meletakkan dasar-dasar organisasi dan kerja dalam kementerian penerangan. Sedangkan sebagai menteri keamanan atau pertahanan antara lain berhasil meletakkan dasar, hakikat, sifat tentara. Setelah kabinet Sjahrir jatuh, Amir Syariffudin menduduki kursi Perdana Menteri sekaligus merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet Amir Syariffudin mengumumkan program politik luar negeri adalah sebagai berikut. 1) Mempertahankan pengakuan *de facto*

Negara Republik Indonesia. 2) Berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan secara damai Persetujuan Linggarjati. 3) Berusaha agar Indonesia secepat mungkin harus ikut serta dalam persoalan hidup internasional sesuai dengan kepentingan kedudukannya dalam dunia. Sedangkan program politik dalam negeri dari kabinet Amir Syariffudin adalah sebagai berikut. 1) Menyempurnakan pemusatan tenaga rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan tanah air. 2) Memperbaiki susunan perwakilan rakyat di pusat dan di daerah secara demokratis dengan pemilihan demokratis yang dijalankan segera apabila keadaan masyarakat telah mengizinkan dengan nyata. 3) Meneruskan usaha menyempurnakan susunan pemerintah *collegial* dan seterusnya menjalankan politik menempatkan pegawai yang sesuai dengan pertahanan dan pembangunan negara. 4) Menyempurnakan dan memperkuat polisi negara sehingga menjadi satu alat negara yang melindungi hak-hak demokratis dan menjamin keamanannya.

Ketika menjabat Perdana Menteri Amir Syariffudin juga berhadapan dengan Prundingan Renville dimana hasil perundingan inilah yang membuatnya kehilangan dukungan dan harus meletakkan jabatan. Setelah tersisih dari pemerintahan Amir Syariffudin mulai dirangkul golongan komunis untuk menjalankan pemerintahan ala komunis. Sampai akhirnya terjadi pemberontakan Madiun. Pimpinan-pimpinan komunis berhasil ditangkap dan diadili. Amir Syariffudin sendiri ditembak dan dikuburkan di daerah Ngalian, sebelah timur kota Solo pada hari Minggu pagi tanggal 19 Desember 1948.

### Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Tak lupa, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Istorica terbitan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat dipublikasikan pada edisi Maret 2015.

#### **Daftar Pustaka**

A.H. Nasution, (1978), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid V, VIII*, Bandung: Angkasa.

\_\_\_\_\_. (1968), *Tentara Nasional Indonesia, Jilid I, II*, Bandung: Seruling Masa.

Wellem, Frederick D., (2009), *Amir Sjarifoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara.

Kahin, George M. C., (1995), *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Solo: UNS Press.

Leclerc, Jaques, (2011), *Mencari Kiri Kaum Revolusi Indonesia dan Revolusi Mereka*, Jakarta: Marjin Kiri.

Kementerian Penerangan, (1993), *Dua Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid IX. Jakarta.

\_\_\_\_\_. (1970) *Susunan Kabinet Republik Indonesia: 1945-1970*, Jakarta.

Kuntowijoyo, (2005), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Soe Hok Gie, (2006), *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.